



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIYANTO
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 145647

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.452.820.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 796 m2/408 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 305.760.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 305.760.000
4. Tanah Seluas 1003 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp.
501.500.000
5. Tanah Seluas 326 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
163.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1894 m2/371 m2 di KOTA SALATIGA
, HASIL SENDIRI Rp. 2.841.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1252 m2/291 m2 di SEMARANG,
HASIL SENDIRI Rp. 1.137.800.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1298 m2/291 m2 di SEMARANG,
HASIL SENDIRI Rp. 1.140.000.000
9. Tanah Seluas 6416 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI
Rp. 3.208.000.000
10. Tanah Seluas 546 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 636.700.000**



1. MOBIL, MITSUBISHI PICKUP BOX Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000
2. MOBIL, MERC BENZ 300 GF Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SPM W175SE Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 18.700.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 110 ESP Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
5. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER VX R Tahun 1997, HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	554.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.574.386.976
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.800.083.000
Sub Total	Rp.	19.018.489.976
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.018.489.976

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.